



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dibuat sebelumnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk sebuah penelitian baru. Maka dari itu, penulis menggunakan dua penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Judul	Konstruksi Isu Kasus Korupsi Wisma Atlet dalam Surat Kabar <i>Jurnal Nasional</i> dan <i>Koran Tempo</i> (Sebuah Studi Analisis <i>Framing</i>)	<i>Framing</i> Kebijakan Presiden Barack Obama Mengenai Perang di Afghanistan pada Surat Kabar <i>Republika</i> dan <i>Suara Pembaruan</i>	<i>Framing</i> Dana Aspirasi DPR Oleh <i>Harian Kompas</i> dan <i>Media Indonesia</i> (Studi Analisis <i>Framing</i> Robert Entman)
Peneliti	Rizky Fitria	Claudy Isabella	Arum Kusuma Dewi
Tahun	2012	2012	2016
Universitas	Universitas Multimedia Nusantara	Universitas Multimedia Nusantara	Universitas Multimedia Nusantara
Tujuan Penelitian	Mengetahui bagaimana <i>Koran Tempo</i> dan <i>Jurnal Nasional</i> dalam mengkonstruksi pemberitaan seputar isu kasus korupsi wisma atlet.	Mengetahui bagaimana koran <i>Republika</i> dan <i>Suara Pembaruan</i> membingkai berita mengenai kebijakan Obama sebagai Presiden AS dalam perang melawan Afghanistan.	Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan mengetahui <i>framing</i> mengenai dana aspirasi DPR oleh media <i>Harian Kompas</i> dan <i>Media Indonesia</i> .
Jenis dan	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan

Sifat Penelitian	dan deskriptif	dan deskriptif	kualitatif dan deskriptif
Metode Penelitian	Analisis Isi Kualitatif	Analisis Isi Kualitatif	Analisis Isi Kualitatif
Unit Analisis	12 berita <i>Jurnal Nasional</i> dan <i>Koran Tempo</i>	11 berita <i>Republika</i> dan <i>Suara Pembaruan</i>	9 berita <i>Harian Kompas</i> dan <i>Media Indonesia</i>
Teknik Analisis Data	Analisis <i>framing</i> model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	Analisis <i>framing</i> model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	Analisis <i>Framing</i> Robert Entman
Konsep Model Framing	Sintaksis, skrip, tematik, retorik	Sintaksis, skrip, tematik, retorik	Pendefinisian masalah, perkiraan penyebab masalah, keputusan moral, penekanan penyelesaian masalah
Hasil Penelitian	<i>Jurnal Nasional</i> cenderung melihat kasus ini dari sisi hukum, sedangkan <i>Koran Tempo</i> cenderung melihat kasus ini dari sisi politik.	<i>Republika</i> cenderung menekankan pemberitaan pada ranah politik dan cenderung provokatif. <i>Suara Pembaruan</i> secara eksplisit mendukung kebijakan Pres Obama memerangi terorisme, yakni Osama bin Laden dan Alqaeda, yang didasarkan pada prinsip <i>peace journalism</i> .	-

Penelitian pertama berjudul “Konstruksi Isu Kasus Korupsi Wisma Atlet dalam Surat Kabar Jurnal Nasional dan Koran Tempo (Sebuah Studi Analisis *Framing*)” oleh Rizky Fitria. Skripsi tersebut dilakukan untuk mengetahui

bagaimana *Koran Tempo* dan *Jurnal Nasional* dalam mengkonstruksikan pemberitaan seputar masalah kasus korupsi wisma atlit.

Penelitian Rizky menganalisis dua media, yakni *Koran Tempo* dan *Jurnal Nasional*. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap pemberitaan *Harian Kompas* dan *Media Indonesia*. Kedua penelitian sama-sama menggunakan dua media untuk melakukan perbandingan antara media yang berafiliasi dengan partai politik dan media yang tidak memiliki hubungan dengan partai politik tertentu.

Pendekatan penelitian tersebut adalah kualitatif berdasarkan paradigma konstruktivis. Rizky Fitria menggunakan metode analisis *framing* dari Zongdang Pan dan Gerald M. Koss dengan melihat empat elemen, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah terdapat *framing* yang berbeda dari kedua media. Dalam mengkonstruksi isu korupsi wisma atlit, *Jurnal Nasional* cenderung melihat kasus ini dari sisi hukum. Sementara *Koran Tempo* cenderung melihat kasus ini dari sisi politiknya.

Penelitian saat ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan menggunakan analisis *framing*. Perbedaannya adalah Rizky menggunakan *framing* model Zongdang Pan dan Gerald M. Koss dan penulis menggunakan analisis *framing* model Robert Entman. *Framing* model ini membedah teks berita ke dalam empat struktur besar, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Perbedaan paling menonjol di kedua model *framing* ini adalah struktur analisis dan perangkat *framing*.

Keempat struktur Pan dan Kosicki menganalisis cara wartawan menyusun, mengisahkan, menulis, dan menekankan fakta. Struktur ini kurang menekankan siapa saja aktor-aktor yang ditonjolkan dalam berita. Sementara *framing* model Entman akan menunjukkan aktor-aktor yang ditonjolkan oleh wartawan dalam teks beritanya. Konsep *framing* Entman adalah pendefinisian masalah, perkiraan penyebab masalah, pembuatan keputusan moral, dan penekanan penyelesaian.

Perangkat *framing* yang dianalisis dalam model Pan Kosicki di antaranya skema, kelengkapan berita, detail, bentuk kalimat, leksikon, dan grafis. Namun dalam *framing* model Entman, perangkat tersebut masuk ke *framing* level dua atau level mikro.

Di sisi lain, analisis *framing* pemberitaan mengenai kasus korupsi sudah banyak dilakukan. Maka peneliti ingin menganalisis topik yang belum banyak dilakukan, tetapi tidak kalah penting karena terkait dengan kepentingan masyarakat, yakni pembuatan kebijakan publik dalam negeri.

Penelitian kedua yang berjudul “*Framing: Kebijakan Presiden Barack Obama Mengenai Perang di Afghanistan pada Surat Kabar Republika dan Suara Pembaruan*” ditulis oleh Claudy Isabella dari Universitas Multimedia Nusantara.

Penelitian Claudy juga menggunakan teknik analisis *framing*, tetapi model yang digunakan adalah analisis *framing* milik Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis *framing* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana koran *Republika* dan *Suara Pembaruan* membingkai

berita mengenai kebijakan Obama sebagai Presiden AS dalam perang melawan Afghanistan.

Hasil penelitian Claudy menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi dalam mbingkai isu terjadi karena pengaruh perspektif masing-masing media. *Suara Pembaruan* melihat aksi terorisme oleh Osama bin Laden dan jaringan Alqaeda sebagai tindakan yang harus dilawan. Maka dalam pemberitaannya, *Suara Pembaruan* lebih mendukung kebijakan Presiden Barack Obama yang memang bertujuan untuk melumpuhkan terorisme. Sedangkan *Republika* cenderung abu-abu dalam memberitakan kebijakan Obama tersebut. *Republika* hanya menekankan pada dominasi AS serta kesungguhan Obama dalam memburu pelaku teroris. *Republika* tidak terlalu banyak beropini dalam kasus tersebut.

Penggunaan model Entman juga memiliki kelebihan karena memiliki *frame* “penentuan keputusan moral”. Dengan begitu, peneliti akan lebih mudah melihat sikap media, apakah melegitimasi atau mendelegitimasi masalah tersebut.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Analisis *Framing*

Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh penulis teks. Bentuk penonjolan tersebut bisa dimunculkan dalam beberapa cara: menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, melakukan pengulangan

informasi, atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di pikiran khalayak. Dengan begitu, sebuah ide lebih mudah terlihat dan diperhatikan oleh khalayak (Eriyanto, 2002, h.220).

Konsep *framing* digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media (Hanson, 1995, h. 371). *Framing* merupakan pendekatan untuk mengetahui perspektif yang dipakai wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Fauzi, 2007, h. 23).

Menurut Todd Gitlin (1980 dalam Eriyanto, 2002, h. 78), *framing* merupakan strategi bagaimana realitas atau dunia dikonstruksi dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada pembaca. Peristiwa dan fakta ditampilkan dalam pemberitaan agar terlihat menonjol dan menarik atensi pembaca. *Framing* dilakukan dengan seleksi isu, repetisi, penekanan, dan penyajian aspek tertentu dari realitas.

Gamson dan Modigliani (1989, dalam D'Angelo dan Kuypers, 2009, h.1) menyatakan bahwa sumber-sumber membingkai topik untuk membuat informasi yang menarik dan cocok untuk jurnalis, yang perlu untuk menyampaikan informasi kepada publik yang lebih luas, dan wartawan tidak bisa tidak membingkai topik karena mereka membutuhkan *frame* tersebut untuk membuat berita, pasti menambah atau bahkan melapiskan *frame* mereka sendiri dalam proses.

Berikut definisi *framing* dari beberapa ahli:

Tabel 2.2 Definisi *Framing*

Robert M. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan,

	penekanan, dan presentasi aspek tertentu dengan realitas.
David E. Snow and Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. <i>Frame</i> mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. <i>Frame</i> mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhondang Pan and Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber: Eriyanto (2002, h. 77-79)

Penelitian ini menganalisis pembingkaihan yang dilakukan *Harian Kompas* dan *Media Indonesia* menggunakan perangkat *framing* Robert Entman. Maka hasil penelitian akan menunjukkan fakta dan

aspek apa saja yang dimunculkan dan ditonjolkan oleh kedua media dalam memberitakan dana aspirasi DPR.

Frame berita muncul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. *Frame* berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita (Eriyanto, 2002, h. 224).

Robert Entman melihat *framing* ke dalam dua dimensi, yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. “Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak” (Entman, 1993, dalam Eriyanto, 2002, h. 221).

Tabel 2.3 Dua Dimensi *Framing*

Seleksi Isu	Aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari sekian realitas tersebut, aspek mana yang dipilih untuk disajikan? Dalam proses ini terdapat bagian berita yang dimasukkan tetapi ada yang dikeluarkan. Wartawan memilih aspek tertentu dari isu tersebut.
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek yang berhubungan dengan penulisan fakta. Saat aspek dari isu tersebut sudah diseleksi, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal

	tersebut berhubungan dengan penggunaan kata, kalimat, dan gambar tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.
--	--

Sumber: Eriyanto (2002, h. 222)

Penelitian ini menganalisis dimensi kedua dari *framing*, yakni penonjolan aspek tertentu dari suatu isu. Dengan begitu, tujuan penelitian ini akan terpenuhi, yakni untuk mengetahui bagaimana pembingkai yang dilakukan *Harian Kompas* dan *Media Indonesia* mengenai dana aspirasi DPR melalui penulisan aspek-aspek berita tentang isu tersebut. Analisis dilakukan menggunakan perangkat *framing* Robert Entman, yakni pendefinisian masalah, perkiraan penyebab masalah, penentuan keputusan moral, dan rekomendasi penyelesaian. Selain itu, analisis level mikro juga dilakukan, yakni memeriksa penggunaan kata, kalimat, atau gambar tertentu yang ditampilkan kepada khalayak.

2.2.2 Teori Konstruksi Sosial atas Realitas

Untuk menganalisis bagaimana media membingkai isu dana aspirasi DPR, peneliti menggunakan teori konstruksi sosial sebagai dasar dari konstruksi sosial media massa. Teori ini menjelaskan bahwa realitas adalah hasil konstruksi dari setiap individu. Konstruksi tiap orang berbeda, tergantung dari pengalaman, pengetahuan, dan preferensi tertentu. Wartawan mungkin mempunyai pandangan dan

konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa dan diwujudkan dalam teks berita (Eriyanto, 2002, h. 20). Maka fakta-fakta dan aspek yang ditampilkan dan ditonjolkan wartawan mengenai pemberitaan dana aspirasi DPR merupakan hasil konstruksi dari wartawan, tergantung dari perspektif wartawan tersebut. Dalam memberitakan dana aspirasi DPR, fakta-fakta yang ada dikonstruksi dalam benak wartawan sebagai masalah apa, apa saja penyebab masalah tersebut, dievaluasi dengan keputusan moral tertentu, dan apa solusi yang bisa ditawarkan oleh wartawan tersebut.

Baran (2010, h. 383) menjelaskan bahwa konstruksi sosial atas realitas adalah teori yang mengasumsikan sebuah persetujuan berkelanjutan atas makna, karena orang-orang berbagi sebuah pemahaman mengenai realitas tersebut.

Teori konstruksi sosial atas realitas pertama kali diajukan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann (1966, h. 149) menjelaskan bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Setiap momen berkaitan dengan karakterisasi penting dari dunia sosial.

Eksternalisasi adalah suatu usaha ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik (Berger dan Luckmann, 1966, h. 122). Tahap eksternalisasi berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu

menyesuaikan diri ke dalam dunia sosio-kulturalnya sebagai bagian dari produk manusia (Bungin, 2008, h. 16).

Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai, secara mental atau fisik, dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Yang terpenting dalam tahap objektivasi ini adalah melakukan signifikansi, memberikan tanda bahasa, dan simbolisasi terhadap benda yang disignifikansi (Bungin, 2008, h. 16).

Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Internalisasi secara umum merupakan dasar, pertama, bagi pemahaman mengenai “sesama saya”, yakni pemahaman individu dan orang lain; kedua, bagi pemahaman mengenai dunia sebagai suatu yang maknawi dari kenyataan sosial. Pemahaman ini dimulai dengan individu “mengambil alih” dunia di mana sudah ada orang lain. Dalam proses tersebut, individu dapat memodifikasi dunia, bahkan secara kreatif dapat menciptakan ulang dunia (Bungin, 2008, h. 19).

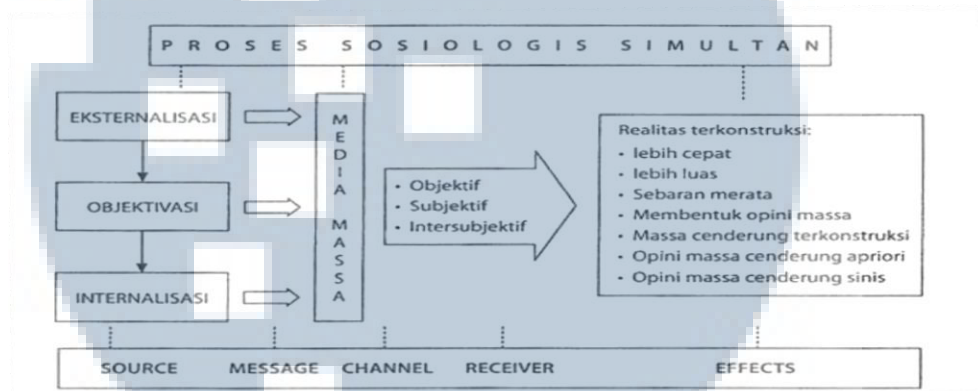
Dalam konstruksi sosial, ketiga proses tersebut bekerja secara dialektis dan terus menerus, sehingga kenyataan bisa bersifat plural, dinamis, dan dialektis, tidak bersifat statis, dan final.

2.2.3 Konstruksi Sosial Media Massa

Konsep konstruksi sosial atas realitas dari Peter Berger dan Thomas Luckmann di atas belum memasukkan media massa sebagai variabel yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas. Bungin

(2008, h. 194) menghubungkan media massa ke dalam konstruksi sosial atas realitas dengan menempatkan semua kelebihan dan efek media massa.

Gambar 2.1 Proses Konstruksi Sosial Media Massa



Sumber: Bungin (2008, h. 194)

Proses tersebut melalui tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap sebaran konstruksi, tahap pembentukan konstruksi realitas, dan tahap konfirmasi.

Dalam tahap menyiapkan materi konstruksi, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yakni keberpihakan media massa terhadap kapitalisme, keberpihakan semua kepada masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Dalam menyiapkan materi konstruksi, umumnya media massa menekankan kepentingan kapitalis. Maka tidak jarang ada pertukaran kepentingan di antara pihak-pihak berpengaruh (Bungin, 2008, h. 195-197).

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Dalam media cetak, sebaran konstruksi media massa

berlangsung secara satu arah. Prinsip dasarnya, semua informasi harus sampai pada pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan agenda media. Apa yang penting bagi media, penting pula bagi pembaca (Bungin, 2008, h. 197-198).

Tahap berikutnya adalah pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tahap konstruksi realitas pembenaran, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, dan sebagai pilihan konsumtif. Konstruksi pembenaran cenderung membenarkan apa yang tersaji di media massa sebagai realitas kebenaran. Tahap kedua, pilihan seseorang untuk menjadi pembaca media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikirannya dikonstruksi oleh media massa. Tahap ketiga merupakan tahap ketika seseorang terbiasa tergantung terhadap media massa. Dalam tahap pembentukan konstruksi realitas ini juga terjadi pembentukan konstruksi citra. Konstruksi citra yang dibangun adalah model *good news* dan *bad news*. Setiap pemberitaan memiliki tujuan tertentu dalam model pencitraan tersebut. Realitas citra media dikonstruksi oleh *desk* dan redaksi (Bungin, 2008, h. 198-200).

Tahap konfirmasi adalah tahapan ketika media massa dan pembaca memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi (Bungin, 2008, h. 200-201).

Penelitian ini menganalisis tahap sebaran konstruksi media dalam pemberitaan mengenai dana aspirasi DPR oleh *Harian Kompas*

dan *Media Indonesia*. Pembingkaihan oleh kedua media dilakukan berdasarkan agenda media masing-masing. *Frame* yang ditampilkan merupakan fakta dan aspek yang dianggap penting oleh media sehingga fakta dan aspek itu jugalah yang akan dianggap penting pula oleh pembaca.

2.2.4 Teks Berita dalam Perspektif Konstruksionis

Suatu berita dapat dilihat berbeda, tergantung perspektif dan paradigma yang dipakai dalam memandangnya, termasuk jika dipandang dalam perspektif konstruksionis.

Eriyanto (2002, h. 17) menjelaskan bahwa dalam perspektif konstruksionis, teks berita tidak dapat disamakan sebagai salinan dari realitas, melainkan sebagai konstruksi atas realitas. Maka, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dibingkai secara berbeda. Berita bukan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil, tetapi merupakan produk interaksi antara wartawan dengan fakta.

Jika ada perbedaan antara berita dengan realitas yang sebenarnya, maka tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi memang seperti itu pemaknaan dari suatu media, contohnya, atas realitas. Membuat berita yang memihak satu pandangan, menempatkan pandangan satu lebih penting dibandingkan pandangan lain, dalam pendekatan konstruksionis dipandang sebagai praktik jurnalistik. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada apakah berita bias atau tidak,

tetapi mengarah kepada bagaimana peristiwa atau isu dikonstruksi (Eriyanto, 2002, h. 27).

Tabel 2.5 Media dan Berita Dipandang dari Paradigma Konstruksionis

Fakta	Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran fakta-fakta sifatnya relatif, berlaku sesuai konteks tertentu.
Media	Media berperan sebagai agen konstruksi pesan.
Berita	Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.
Sifat Berita	Berita bersifat subjektif; opini tidak dapat dihilangkan karena saat meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.
Wartawan	Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku sosial.
Keberpihakan	Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.
Pilihan Moral	Nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian.
Khalayak	Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita.

Sumber: Eriyanto (2002, h. 23-40)

Fakta-fakta yang dihadirkan dalam pemberitaan kasus dana aspirasi DPR merupakan hasil konstruksi dari wartawan *Harian Kompas* dan *Media Indonesia*. Nilai, etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan dari kedua media tidak bisa lepas dan memengaruhi *framing* yang mereka sajikan dalam berita. Hal tersebut nantinya akan menjelaskan mengapa *framing* yang dilakukan oleh kedua media bisa berbeda. Meskipun begitu, pembaca bisa menafsirkan sendiri fakta-fakta terkait dana aspirasi DPR yang berbeda dari perspektif wartawan.

2.2.5 Dana Aspirasi DPR

Dana aspirasi sudah diajukan sejak dua periode lalu. Periode 2004-2009, DPR mengajukan dana aspirasi sebesar Rp 3 miliar sampai Rp 10 miliar per anggota DPR. Periode 2009-2014 wacana dana aspirasi kembali diajukan, yakni sebesar Rp 15 miliar per anggota dewan. Namun kedua usulan tersebut ditolak (Toriq, 2015, para. 1-2).

Dana aspirasi kembali diusulkan sejak munculnya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 80 J tahun 2014. Pasal 80 J berbunyi “Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan...” (Putra, 2015, para. 5).

Wakil Ketua Tim Mekanisme Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, tidak ada yang namanya dana aspirasi, yang ada adalah Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan (Victoria, 2015, para. 1).

Anggota DPR pun mengajukan anggaran dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota dewan, atau mencapai total Rp 11,2 triliun.

Ketua DPR Setyo Novanto menjelaskan bahwa total anggaran dana aspirasi tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Iqbal, 2015, para. 1).

Dana tersebut pun akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Iqbal, 2015, para. 4).

Setyo Novanto juga menyatakan bahwa dana aspirasi tersebut akan dipakai di antaranya untuk pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, kantor desa, sanitasi air bersih, serta pengadaan benih dan bibit di daerah pemilihan anggota dewan (Iqbal, 2015, para. 5).

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak adanya dana aspirasi. Menurutnya, dana untuk pembangunan di daerah sudah masuk APBN. Biaya pembangunan setiap daerah juga tak bisa disamaratakan Rp 20 miliar per daerah (Rastika, 2015, para. 7).

Dana aspirasi juga ditolak karena dianggap bukan wewenang dari DPR. DPR tidak berhak untuk menentukan anggaran seperti membuat program dana aspirasi tersebut (Wahyuni, 2015, para. 4).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VII Pasal 20A menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPR di antaranya memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Terkait fungsi anggaran, tugas dan wewenang DPR antara lain memberikan persetujuan RUU APBN.

Sementara fungsi pengawasan membuat DPR bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah (DPR, 2016, para.1-3).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran yang digunakan peneliti untuk menganalisis berita tentang dana aspirasi DPR:

